

BAB IV

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Provinsi Jawa Tengah

Objek dari penelitian ini adalah pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah. Jawa Tengah merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang terletak di tengah Pulau Jawa. Letaknya antara $5^{\circ}40'$ dan $8^{\circ}30'$ Lintang Selatan dan antara $108^{\circ}30'$ dan $111^{\circ}30'$ Bujur Timur (termasuk Pulau Karimunjawa). Jarak terjauh dari Barat ke Timur adalah 263 km dan dari Utara ke Selatan 226 km (tidak termasuk Pulau Karimunjawa). Adapun batas-batas wilayah sebagai berikut:

- 1) Sebelah Utara berbatasan dengan: Laut Jawa
- 2) Sebelah Timur berbatasan dengan: Provinsi Jawa Timur
- 3) Sebelah Selatan berbatasan dengan: Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
- 4) Sebelah Barat berbatasan dengan: Provinsi Jawa Barat

Luas wilayah Provinsi Jawa Tengah sebesar 3,25 juta hektar (32,544,12 km²) atau sekitar 25,04 persen dari luas pulau Jawa serta 1,70 persen dari luas Indonesia. Provinsi Jawa Tengah beriklim tropis yang dipengaruhi oleh musim kemarau dan musim hujan. Provinsi Jawa Tengah memiliki wilayah administrasi yang terbagi menjadi 29 Kabupaten dan 6 Kota yang terdapat 573 kecamatan, 750 kelurahan, dan 8.809 desa dimana ibukota di Kota Semarang. Kabupaten Cilacap merupakan kabupaten yang terluas dengan luas wilayah sebesar 2.138,51 km²,

sedangkan kabupaten yang memiliki luas wilayah terkecil adalah Kabupaten Kudus dengan luas wilayah sebesar 425,17 km², dan kota yang memiliki luas wilayah terluas dan terkecil yaitu Kota Semarang dengan luas wilayah sebesar 373,67 km² dan Kota Magelang dengan luas wilayah hanya sebesar 18,12 km².

4.2 Pengujian dan Hasil Analisis Data

Analisis yang dilakukan dalam penelitian ini meliputi analisis terhadap variabel dependen yaitu kinerja keuangan pemerintah daerah yang diukur dengan menggunakan salah satu rasio keuangan yaitu rasio ketergantungan serta analisis terhadap variabel independen yaitu Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Pertumbuhan Ekonomi dan *Leverage*.

Penelitian ini menggunakan sampel pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teknik *purposive sampling* dengan jumlah sampel sebanyak 25 kabupaten/kota. Pengolahan variabel dalam penelitian ini menggunakan program IBM SPSS versi 20.

Tabel 4.1

Hasil Penentuan Sampel

Kriteria	Jumlah
Pemerintah daerah kab/kota di Provinsi Jawa Tengah	35
Kabupaten/Kota yang tidak sesuai dengan kriteria	(10)
Jumlah sampel	25
Total sampel penelitian untuk 5 tahun (2013-2017)	125

Dari kriteria sampel yang sudah disebutkan terdapat 25 sampel yang memenuhi kriteria dan 10 sampel tidak memenuhi kriteria. Sampel yang tidak memenuhi kriteria dikarenakan data yang disajikan tidak lengkap (data yang disajikan hanya tahun tertentu) dan terdapat laporan keuangan yang tidak dipublikasikan. Penulis sudah mencoba *follow up* data tetapi tidak ada respon/respon terlalu lama. Kabupaten/kota yang tidak memenuhi kriteria sampel yaitu Kab. Batang, Kab. Brebes, Kab. Kebumen, Kab. Kendal, Kab. Pemasang, Kab. Sragen, Kab. Sukoharjo, Kab. Tegal, Kab. Wonogiri dan Kota Pekalongan.

4.2.1 Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif dapat memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dapat dilihat dari rata-rata (*mean*), standar deviasi, nilai maksimum dan nilai minimum. Hasil statistik deskriptif akan disajikan dalam Tabel 4.2 berikut ini:

Tabel 4.2
Statistik Deskriptif

	n	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pendapatan Asli Daerah	125	95.193	1.791.886	296.797,04	236.881,210
Dana Perimbangan	125	165.531	2.030.245	1.0373.15,19	371.360,986
Pertumbuhan Ekonomi	125	1,66	23,53	5,35	1,82
<i>Leverage</i>	125	0,000	0,068	0,007	0,009
Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	125	1,55	34,73	6,09	3,85

Sumber: Data sekunder diolah, tahun 2019

Berdasarkan hasil analisis statistika deskriptif pada Tabel 4.2 diperoleh informasi bahwa nilai minimum variabel Pendapatan Asli Daerah dari tahun 2013 sampai dengan 2017 yaitu 95.193, sedangkan nilai maksimum 1.791.886 nilai tersebut dimiliki oleh Kota Semarang pada tahun 2017, dan rata-rata nilai variabel Pendapatan Asli Daerah sebesar 296.797,04 dengan standart deviasi 236.881,210.

Nilai minimum variabel Dana Perimbangan yaitu 165.531 nilai tersebut dimiliki oleh Kabupaten Rembang pada tahun 2014, sedangkan nilai tertinggi yaitu sebesar 2.030.245 dimiliki oleh Kabupaten Cilacap pada tahun 2017, dan rata-rata nilai variabel Dana Perimbangan sebesar 1.037.315,19 dengan standart deviasi 371.360,986.

Nilai minimum variabel Pertumbuhan Ekonomi yaitu 1,66% nilai tersebut dimiliki oleh Kabupaten Cilacap pada tahun 2013, sedangkan nilai tertinggi yaitu sebesar 23,53% dimiliki oleh Kabupaten Blora pada tahun 2016, dan rata-rata nilai variabel Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,35 dengan standart deviasi 1,82.

Nilai minimum variabel *Leverage* yaitu 0,000 nilai tersebut dimiliki oleh beberapa kabupaten/kota yaitu Kabupaten Klaten, Kabupaten Boyolali, dan Kota Magelang, sedangkan nilai tertinggi yaitu sebesar 0,068 dimiliki oleh Kabupaten Temanggung pada tahun 2017, dan rata-rata nilai variabel *Leverage* sebesar 0,007 dengan standart deviasi 0,009.

Nilai minimum variabel Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah yaitu 1,55 nilai tersebut dimiliki oleh Kabupaten Temanggung pada tahun 2013, sedangkan nilai tertinggi yaitu sebesar 34,73 dimiliki oleh Kabupaten Blora pada tahun 2017,

dan rata-rata nilai variabel Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah sebesar 6,09 dengan standart deviasi 3,85.

4.3 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dilakukan sebelum melakukan analisi regresi berganda. Uji asumsi klasik ini terdiri dari uji normalitas data, uji multikolinearitas dan uji heterokedastisitas.

4.3.1 Uji Normalitas

Menurut Ghozali (2018) uji normalitas bertujuan untuk mengetahui distribusi data dalam variabel yang digunakan dalam penelitian. Data yang baik dan layak digunakan dalam penelitian adalah data yang memiliki distribusi normal. Untuk menguji apakah distribusi dari data residualnya normal atau tidak, dapat dilakukan dengan uji statistik non parametik *One Sample Kolmogorov-smirnov* (K-S). Apabila hasil *One Sample Kolmogorov-smirnov* menunjukkan nilai signifikan diatas 0,05 maka data residual terdistribusi dengan normal. Berikut hasil uji normalitas ditunjukkan pada Tabel 4.3:

Tabel 4.3

Hasil Uji Normalitas *One Sample Kolmogorov-smirnov* (K-S)

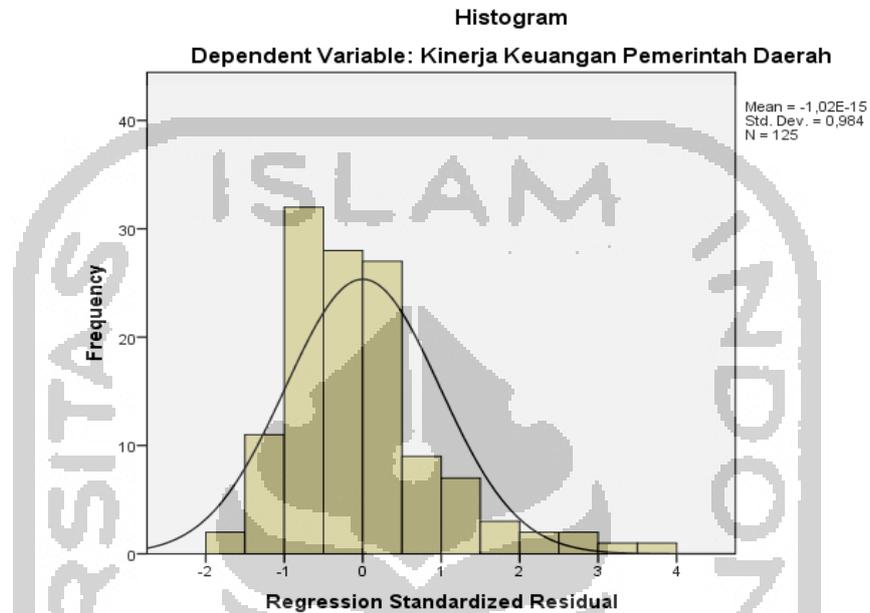
		Unstandardized Residual
n		125
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0E-7
	Std. Deviation	2,80740316
Most Extreme Differences	Absolute	,124
	Positive	,124
	Negative	-,080
Kolmogorov-Smirnov Z		1,057
Asymp. Sig. (1-tailed)		,214

Sumber: Data sekunder diolah, tahun 2019

Berdasarkan Tabel 4.3 diperoleh bahwa nilai signifikansi sebesar 0,214 dan nilai tersebut lebih besar dari $\alpha = 0,05$ hal ini berarti dapat disimpulkan bahwa model regresi berdistribusi normal. Tampilan histogram uji normalitas dapat dilihat pada gambar 4.1 berikut:

Gambar 4. 1

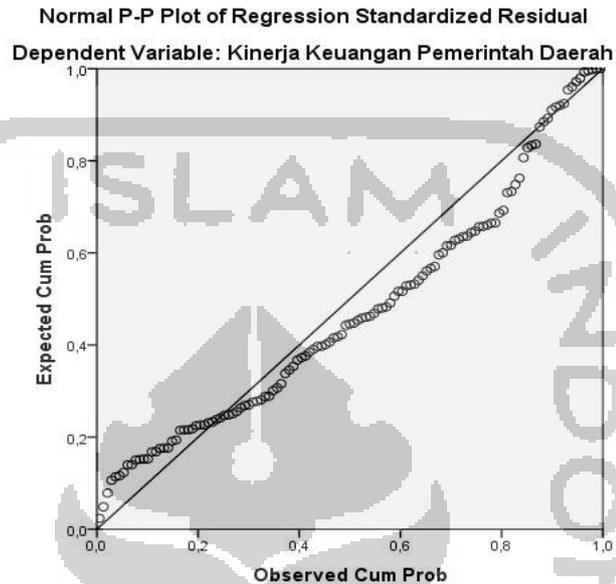
Histogram Uji Normalitas



Berdasarkan tampilan histogram pada gambar 4.1 di atas, grafik histogram memberikan pola distribusi yang melenceng ke kanan yang artinya adalah data tersebut berdistribusi normal. Menurut Ghozali (2018) mendeteksi adanya normalitas dapat dilakukan dengan melihat penyebaran data (titik) pada sebuah diagonal dari grafik. Selain itu, uji normalitas juga dapat dilihat dengan menggunakan grafik P-P Plot. Berikut ini Gambar 4.2 Uji Normalitas dengan P-P Plot:

Gambar 4.2

Hasil Uji Normalitas P-P Plot



Gambar 4.2 menunjukkan bahwa Grafik Normal P-P Plot terlihat titik-titik menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, sehingga asumsi normalitas dapat terpenuhi. Kesimpulan dari pengujian *Kolmogorov-smirnov* (K-S) dan grafik Normal P-P Plot diatas adalah data yang dipergunakan dalam penelitian berdistribusi normal.

4.3.2 Uji Multikolinieritas

Uji Multikolinieritas bertujuan untuk melihat apakah dalam model regresi ditemukan adanya kolerasi antara variabel independen (Ghozali, 2018). Model regresi yang baik apabila diuji maka tidak akan berkorelasi. Cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinieritas di dalam model regresi dapat dilihat dari besarnya nilai *Tolerance* dan *VIF*-nya (*Variance Inflation Factor*)

dengan bantuan program *Statistical Product and service Solution (SPSS)*. Regresi bebas dari masalah Multikolinieritas jika nilai *Tolerance* lebih dari 10 persen (0,10) dan nilai VIF kurang dari 10,00 (Sugiyono, 2015). Hasil uji multikolinieritas disajikan pada Tabel 4.4 dibawah ini.

Tabel 4.4
Hasil Uji Multikolinieritas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
(Constant)		
LN Pendapatan Asli Daerah	0,782	1,279
LN Dana Perimbangan	0,778	1,285
Pertumbuhan Ekonomi	0,998	1,002
<i>Leverage</i>	0,987	1,014

Sumber: Data sekunder diolah, tahun 2019

Berdasarkan hasil uji multikolinieritas Tabel 4.4 menunjukkan bahwa nilai *tolerance* pada variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, Pertumbuhan Ekonomi, dan *Leverage* > 0,1. Selain itu, apabila dilihat dari nilai VIF pada semua variabel yaitu < 10. Hal ini berarti pada model dinyatakan tidak terjadi multikolinieritas.

4.3.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedasitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari *residual* satu pengamatan ke pengamatan yang lain (Ghozali, 2018). Apabila *variance* dari *residual* satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homokedastisitas dan apabila berbeda

disebut heteroskedastisitas. Cara mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas dalam penelitian ini, maka akan digunakan uji *Glejser* dengan bantuan program SPSS. Jika koefisien parameter $\alpha > 0,05$ maka tidak ada masalah heteroskedastisitas. Hasil uji heteroskedastisitas disajikan pada Tabel 4.5 dibawah ini:

Tabel 4.5

Hasil Uji Heteroskedastisitas dengan *Glejser*

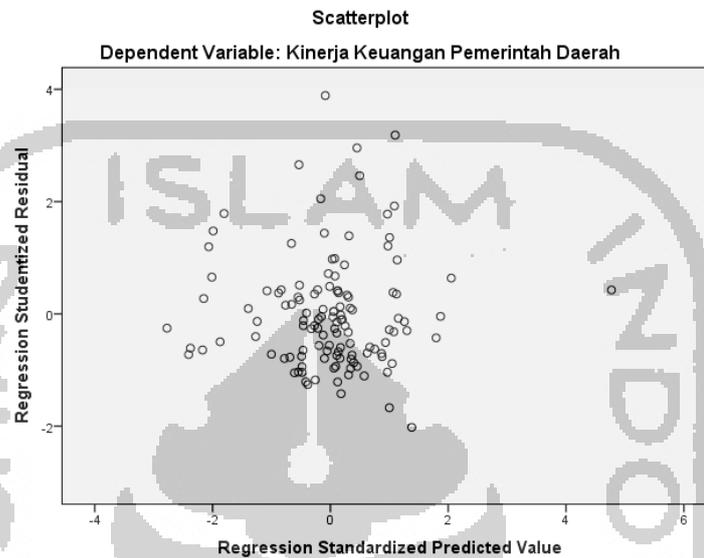
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	11,483	5,430		2,115	0,037
1 LN Pendapatan Asli Daerah	0,275	0,371	0,074	0,743	0,459
LN Dana Perimbangan	-0,392	0,411	-0,095	-0,953	0,343
Pertumbuhan Ekonomi	-0,055	0,092	-0,053	-0,598	0,551
<i>Leverage</i>	-43,271	18,338	-0,210	0,284	0,777

Sumber: Data sekunder diolah, tahun 2019

Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas pada Tabel 4.5 menunjukkan bahwa nilai signifikansi pada variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, Pertumbuhan Ekonomi, dan *Leverage* lebih besar dari 0,05. Hal ini berarti variansi data tidak terjadi heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas juga dapat dilihat dengan menggunakan diagram *scatterplot*. Hasil pengujian heteroskedastisitas menggunakan diagram *scatterplot* ditunjukkan pada Gambar 4.3 dibawah ini:

Gambar 4. 3

Uji Heterokedastisitas dengan *Scatterplot*



Berdasarkan Gambar 4.3 dapat dilihat bahwa titik-titik menyebar dengan pola yang acak di atas ataupun di bawah angka 0 pada sumbu Y. Hal ini berarti tidak terjadi masalah heteroskedastitas pada model.

4.4 Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh pendapatan asli daerah (X_1), dana perimbangan (X_2), pertumbuhan ekonomi (X_3) dan *leverage* (X_4) terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah (Y). Berdasarkan hasil regresi berganda dengan bantuan program SPSS 20.0 maka diperoleh hasil yang disajikan pada Tabel 4.6 sebagai berikut:

Tabel 4.6

Hasil Uji Analisis Regresi Linier Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	7,449	8,332		0,894	0,373
1 LN Pendapatan Asli Daerah	-1,787	0,569	0,308	-3,140	0,102
LN Dana Perimbangan	-1,442	0,631	0,224	-2,287	0,024
Pertumbuhan Ekonomi	-0,179	0,141	0,110	-1,268	0,207
<i>Leverage</i>	-14,792	28,140	-0,046	-0,526	0,600

Sumber: Data sekunder diolah, tahun 2019

Berdasarkan Tabel 4.6 diperoleh hasil persamaan regresi linear berganda sebagai berikut:

$$\hat{Y} = 7,449 - 1,787X_1 - 1,442X_2 - 0,179X_3 - 14,792X_4$$

Keterangan :

Y = Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

X₁ = Pendapatan Asli Daerah

X₂ = Dana Perimbangan

X₃ = Pertumbuhan Ekonomi

X₄ = *Leverage*

Interpretasi dari persamaan regresi linier berganda diatas diperoleh makna sebagai berikut:

1. Pada persamaan model regresi linier berganda diperoleh konstanta sebesar 7,449 yang berarti bahwa variabel Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah tanpa dipengaruhi oleh variabel Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Pertumbuhan Ekonomi, dan *Leverage* hasilnya konstan sebesar 7,449.
2. Koefisien pada variabel Pendapatan Asli Daerah sebesar -1,787 yang berarti ada pengaruh negatif dari variabel Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Koefisien tersebut juga memiliki arti bahwa setiap kenaikan satu-satuan dari variabel Pendapatan Asli Daerah akan menurunkan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah sebesar 1,787.
3. Koefisien pada variabel Dana Perimbangan sebesar -1,442 yang berarti ada pengaruh negatif dari variabel Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Koefisien tersebut juga memiliki arti bahwa setiap kenaikan satu-satuan dari variabel Dana Perimbangan akan menurunkan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah sebesar 1,442.
4. Koefisien pada variabel Pertumbuhan Ekonomi sebesar -0,179 yang berarti ada pengaruh negatif dari variabel Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Koefisien tersebut juga memiliki arti bahwa setiap kenaikan satu-satuan dari variabel Pertumbuhan

Ekonomi akan menurunkan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah sebesar 0,179.

5. Koefisien pada variabel *Leverage* sebesar -14,792 yang berarti ada pengaruh negatif pada variabel *Leverage* terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Koefisien tersebut juga memiliki arti bahwa setiap kenaikan satu-satuan dari variabel *Leverage* akan menurunkan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah sebesar 14,792.

4.5 Analisis Koefisien Determinasi (*Adjusted R²*)

Besarnya nilai koefisien determinasi (R^2) hanya antara 0-1 ($0 < R^2 < 1$). Nilai koefisien determinasi dalam penelitian ini menggunakan nilai *Adjusted R Square* karena analisis yang digunakan adalah regresi berganda. Nilai koefisien determinasi ditunjukkan dengan nilai *Adjusted R square*, bukan *R Square* dari model regresi karena *R Square* bias terhadap jumlah variabel dependen yang dimasukkan ke dalam model, sedangkan *Adjusted R square* dapat naik turun jika suatu variabel independen ditambahkan dalam model (Ghozali, 2018).

Koefisien determinasi *Adjusted R Square* digunakan untuk memprediksi seberapa besar pengaruh dari variabel pendapatan asli daerah, dana perimbangan, pertumbuhan ekonomi dan *leverage* terhadap variabel kinerja keuangan pemerintah daerah. Hasil analisis koefisien determinasi (*Adjusted R²*) disajikan pada Tabel 4.7 berikut ini:

Tabel 4.7

Hasil Analisis Koefisien Determinasi (*Adjusted R²*)

Model	R	<i>R Square</i>	<i>Adjusted R Square</i>	Std. Error of the Estimate
1	0,316	0,100	0,070	2,85381

Sumber: Data sekunder diolah, 2019

Berdasarkan Tabel 4.7 diperoleh hasil *Adjusted R²* sebesar 0,070 atau 7%. Hal ini berarti variabel Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Pertumbuhan Ekonomi, dan *Leverage* memiliki pengaruh kontribusi sebesar 7% terhadap variabel Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah, sedangkan sisanya yaitu 100% dikurangi 7% sebesar 93% dipengaruhi oleh variabel-variabel lain diluar variabel penelitian.

4.6 Uji Parsial (uji t)

Uji t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2018). Dalam hal ini berarti untuk menguji signifikansi pengaruh variabel independen (Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Pertumbuhan Ekonomi, *Leverage*) secara parsial atau individual terhadap variabel dependen (Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah) dilakukan dengan menggunakan uji t (t-test). Hasil uji t dapat dilihat pada tabel *coefficients* pada kolom *sig (significance)*. Menurut Ghozali (2018) apabila probabilitas nilai t atau signifikansi $< 0,05$, maka variabel independen secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Hasil uji t disajikan pada Tabel 4.8 berikut ini:

Tabel 4.8

Hasil Uji Parsial (Uji t)

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	7,449	8,332	0,373	0,894	0,373
	LN Pendapatan Asli Daerah	-1,787	0,569	0,002	-3,140	0,102
	LN Dana Perimbangan	-1,442	0,631	0,024	-2,287	0,024
	Pertumbuhan Ekonomi	-0,179	0,141	0,207	-1,268	0,207
	<i>Leverage</i>	-14,792	28,140	0,600	-0,526	0,600

Sumber: Data sekunder diolah, tahun 2019

Berdasarkan uji t pada Tabel 4.10 diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Nilai signifikansi variabel pendapatan asli daerah sebesar 0,102, nilai tersebut lebih dari 0,05. Hal ini berarti bahwa **H₁ tidak didukung**, artinya tidak terdapat pengaruh variabel pendapatan asli daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.
2. Nilai signifikansi variabel dana perimbangan sebesar 0,024, nilai tersebut kurang dari 0,05. Hal ini berarti bahwa **H₂ didukung**, artinya terdapat pengaruh variabel dana perimbangan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.
3. Nilai signifikansi variabel pertumbuhan ekonomi sebesar 0,207, nilai tersebut lebih dari 0,05. Hal ini berarti bahwa **H₃ tidak didukung**, artinya tidak terdapat pengaruh variabel pertumbuhan ekonomi terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

4. Nilai signifikansi variabel *leverage* sebesar 0,600, nilai tersebut lebih dari 0,05. Hal ini berarti bahwa **H₄ tidak didukung**, artinya tidak terdapat pengaruh variabel *leverage* terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

4.7 Pembahasan

4.7.1 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Pendapatan asli daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, hal tersebut dibuktikan dengan nilai signifikansi sebesar 0,102 > 0,05 dan nilai koefisien pendapatan asli daerah sebesar -1,787. Koefisien bernilai negatif berarti jika variabel pendapatan asli daerah mengalami penurunan maka variabel kinerja keuangan pemerintah daerah akan menurun. Setiap kenaikan satu poin pada variabel pendapatan asli daerah maka variabel kinerja keuangan pemerintah daerah akan mengalami penurunan sebesar 1,787.

Konsep *agency theory* menurut Anthony dan Govindarajan dalam Siagian (2011:10) adalah hubungan atau kontak antara *principal* dan *agent*. Pada organisasi sektor publik, hubungan keagenan dapat dilihat dalam penyusunan anggaran. Di Indonesia dokumen anggaran daerah disebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), baik untuk provinsi maupun kabupaten dan kota. Proses penyusunan anggaran pasca Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 melibatkan dua pihak: eksekutif dan legislatif, masing-masing melalui sebuah tim atau panitia anggaran.

Kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang secara langsung maupun tidak langsung menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan sosial masyarakat. Dalam rangka menjalankan fungsi dan kewenangan, pemerintah dapat mengenali potensi dan mengidentifikasi sumber daya yang dimilikinya. Pemerintah diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber keuangan khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan Asli Daerah sebagai sumber pendapatan bersih yang berhak diakui pemerintah daerah yang mana pemerintah daerah berwenang dan memiliki kebebasan dalam hal mengelola sumber pendapatan yang berasal dari daerahnya sendiri.

Pendapatan Asli Daerah dalam penelitian ini belum mampu menunjukkan pengaruhnya terhadap kinerja keuangan daerah. Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan kemungkinan karena pemerintah daerah kurang optimal dalam mengelola penerimaan dari potensi pendapatan yang telah ada. Selain itu, pemerintah daerah dalam penggunaan Pendapatan Asli Daerah belum efektif dan efisien yang dibuktikan dengan proyek pemerintah daerah yang belum tepat sasaran. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mulyani (2015) yang menyimpulkan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

4.7.2 Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Dana perimbangan berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, hal tersebut dibuktikan dengan nilai signifikansi $0,024 < 0,05$ dan nilai koefisien dana perimbangan sebesar $-1,442$. Koefisien bernilai negatif berarti jika variabel dana perimbangan mengalami kenaikan maka variabel kinerja keuangan Pemerintah Daerah akan mengalami penurunan. Setiap kenaikan satu poin pada variabel dana perimbangan maka variabel kinerja keuangan pemerintah daerah akan mengalami penurunan sebesar $1,442$.

Menurut Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 pada Pasal 1 ayat 19, dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana perimbangan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan sehingga dapat terlaksana pelayanan kepada masyarakat. Dana perimbangan yang meliputi Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan dana transfer dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dengan tujuan untuk membiayai kelebihan belanja daerah. Apabila realisasi belanja daerah lebih tinggi daripada pendapatan daerah maka akan terjadinya defisit. Oleh karena itu, untuk menutup kekurangan belanja daerah maka pemerintah pusat akan mentransfer dana dalam bentuk dana perimbangan kepada pemerintah daerah. Semakin besar transfer dana perimbangan yang diterima dari pemerintah pusat maka akan semakin kuat pemerintah daerah bergantung kepada pemerintah pusat guna memenuhi

kebutuhan daerahnya. Sehingga akan membuat kinerja keuangan pemerintah semakin menurun.

Tingkat kemampuan daerah untuk menghimpun pendapatan sangat bervariasi, hal ini bergantung kondisi daerah yang memiliki kekayaan sumber daya alam. Daerah dengan sumber daya yang sedikit memerlukan subsidi atau dana perimbangan agar dapat mencapai standar pelayanan minimum. Oleh karena itu dengan adanya dana perimbangan yang diberikan oleh pemerintah pusat diharapkan pemerintah daerah dapat mengoptimalkan dana perimbangan dengan sebagaimana mestinya (Pratiwi, 2018).

Penelitian Armaja (2015) menguji pengaruh dana perimbangan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Aceh. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa dana perimbangan berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah tersebut. Budianto (2016) juga menguji pengaruh dana perimbangan terhadap kinerja keuangan pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Utara. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa dana perimbangan berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah tersebut.

4.7.3 Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Berdasarkan uji hipotesis menunjukkan pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, hal tersebut dibuktikan dengan nilai signifikansi $0,207 > 0,05$ dan nilai koefisien pertumbuhan

ekonomi sebesar -0,179. Koefisien bernilai negatif berarti jika variabel pertumbuhan ekonomi mengalami kenaikan maka variabel kinerja keuangan pemerintah daerah akan mengalami penurunan. Setiap kenaikan satu poin pada variabel pertumbuhan ekonomi maka variabel kinerja keuangan pemerintah daerah akan mengalami penurunan sebesar 0,179.

Jawa Tengah merupakan salah satu daerah yang memiliki sektor perekonomian yang melimpah dan terus berkembang. Namun demikian, tingginya pertumbuhan impor luar negeri di tengah perbaikan ekspor yang relatif terbatas menjadi penahan laju perekonomian untuk tumbuh lebih tinggi. Ditinjau dari sisi lapangan usaha, meningkatnya pertumbuhan lapangan usaha perdagangan besar dan eceran serta pertanian menjadi pendorong laju pertumbuhan ekonomi sedangkan lapangan usaha industri pengolahan tercatat tumbuh melambat.

Pertumbuhan ekonomi dalam penelitian ini belum mampu menunjukkan pengaruhnya terhadap kinerja keuangan daerah. Hal tersebut kemungkinan karena Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Jawa Tengah sudah tinggi yang dapat dilihat dari faktor tenaga kerja dan pendidikan. Tingkat IPM yang tinggi menunjukkan kemampuan penduduk dalam menyerap dan mengelola sumber-sumber pertumbuhan ekonomi, baik kaitannya dengan teknologi maupun terhadap kelembagaan sebagai sarana penting untuk mencapai pertumbuhan ekonomi (Lilya dan Suwardana, 2014). Disamping IPM, tenaga kerja sebagai salah satu faktor produksi yang akan mempengaruhi tinggi rendahnya tingkat pendapatan nasional dari segi kuantitas atau jumlah saja. Selain tenaga kerja, pendidikan juga memiliki peranan penting dalam upaya menciptakan sumber daya manusia yang

berkualitas. Semakin tinggi tingkat pendidikan yang dicapai, maka semakin tinggi pula kualitas sumber daya manusia yang dimiliki, sehingga selain bisa memperoleh pekerjaan yang layak dengan gaji atau upah yang sesuai, tingginya tingkat pendidikan juga dapat mencerminkan taraf intelektualitas suatu masyarakat. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Kurniawati (2015) yang menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

4.7.4 Pengaruh *Leverage* terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Berdasarkan uji hipotesis menunjukkan *leverage* tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, hal tersebut dibuktikan dengan nilai signifikansi $0,600 > 0,05$ dan nilai koefisien *leverage* sebesar $-14,792$. Koefisien bernilai negatif berarti jika variabel *leverage* mengalami kenaikan maka variabel kinerja keuangan pemerintah daerah akan mengalami penurunan. Setiap kenaikan satu poin pada variabel *leverage* maka variabel kinerja keuangan Pemerintah Daerah akan mengalami penurunan sebesar $14,792$.

Menurut Bastian (2012) pendanaan dalam sektor pemerintahan adalah pendapatan asli daerah, dana perimbangan, pinjaman daerah dan lain-lain pendapatan yang sah. Pendanaan tersebut akan digunakan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah. Dari keempat pendapatan tersebut pinjaman daerah adalah alternatif terakhir setelah pendapatan yang dimiliki pemerintah daerah dan dana perimbangan karena kedua hal tersebut tidak memiliki resiko

yang tinggi, tidak ada beban bunga dan tidak adanya tuntutan dalam pengembalian.

Alasan lain yang berkaitan dengan pembiayaan eksternal yang berupa hutang dalam suatu unit usaha mungkin dapat menjadi ukuran kemandirian karena dalam suatu unit usaha, hutang menjadi pendanaan yang patut diperhitungkan (Ayuningsih, 2016). Namun, apabila *leverage* diterapkan dalam pemerintah daerah, posisi *leverage* tidak dapat disamakan pada kondisi dari suatu unit usaha karena pembiayaan eksternal pemerintahan daerah tidak hanya melalui hutang tetapi juga berasal dari dana bantuan pemerintah pusat yaitu Dana Perimbangan (Kusumawardani, 2012).

Pemerintah daerah yang memiliki *leverage* yang besar maka semakin besar ketergantungan entitas pada pihak luar karena semakin besar hutang yang dimiliki entitas tersebut, sehingga semakin rendah kinerja keuangan entitas begitupun dengan sebaliknya (Rochmah, 2015). Menurut Choiriyah (2010), *leverage* merupakan proporsi total hutang terhadap rata-rata ekuitas. *Leverage* dianggap penting karena dengan rasio hutang maka kreditor akan dapat melihat kemampuan pemerintah daerah untuk membayar utang (Artha, Basuki dan Alamsyah 2015).

Leverage dalam penelitian ini belum mampu menunjukkan pengaruhnya terhadap kinerja keuangan daerah. *Leverage* tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan kemungkinan karena ratio hutang atau *DER (Debt Equity Ratio)* antar daerah yang digunakan dalam penelitian ini memiliki selisih yang tidak terlalu besar, sehingga variabel *leverage* tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja keuangan. Selisih ratio hutang atau *DER (Debt Equity Ratio)* yang tidak

terlalu besar mengindikasikan pemerintah daerah tidak terbebani oleh hutang. Jika rasio ini tinggi, maka pemerintah daerah mungkin sudah kelebihan hutang dan harus dicari jalan untuk mengurangnya (Minarsih, 2015). Penelitian ini sejalan dengan penelitian Kusumawardani (2012) dan Sari (2016) yang menunjukkan bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Indonesia.

